OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: Pradnya_yustiawan@unud.ac.id
I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p05>

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen air minum isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peranan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang masih tergolong minim, dalam artian kurangnya pemantauan dari dinas terkait dalam melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penjual air minum isi ulang. Peran Pemerintah Daerah Dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Lab Kesehatan Masyarakat sangat penting mengingat sebelum dikeluarkannya ijin atas kelayakannya Lab Kesehatan akan melakukan uji klinis terlebih dahulu kemudian jika sudah ditetapkan dan dikeluarkan hasilnya maka pengawasan dari air minum isi ulang atau air minum untuk konsumsi masyarakat menjadi tanggung jawab Lab Kesehatan Masyarakat. Agar tidak merugikan konsumen pelanggan air minum isi ulang maka pemerintah Daerah Melalui Dinas Kesehatan dan Lab Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu melakukan pengawasan yang ketat dan optimal terhadap air minum isi ulang di daerah masing-masing

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, pengawasan, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the extent of the role of local governments in providing legal protection to drinking water consumers. This research uses empirical juridical research methods. The data used in this research consists of primary data and secondary data. All data collected was analyzed using qualitative methods. The results of this research found that the role of local governments in providing legal protection for consumers of refillable drinking water is still relatively minimal, meaning there is a lack of monitoring from the relevant agencies in monitoring or supervising sellers of refillable drinking water. The role of the Regional Government. In this case, the Health Service through the Public Health Lab is very important considering that before issuing a permit for suitability, the Health Lab will carry out clinical trials first, then once the results have been determined and the results are released, then the supervision of refillable drinking water or drinking water for public consumption is the responsibility answered the Public Health Lab. In order not to harm consumers who are customers of refillable drinking water, the Regional Government, through the Health Service and Public Health Lab, is expected to be able to carry out strict and optimal supervision of refillable drinking water in their respective regions.

Keywords: Regional Government; supervision; consumer protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia akan ketersediaan air minum sangat penting, air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Jika dilihat mengenai air bersih yang merupakan standar Kesehatan, air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi. Menurut WHO, air domestik adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan domestik seperti konsumsi, air minum dan persiapan makanan.¹

Banyak kita jumpai ketentuan mengenai air bersih, antara lain ketentuan air bersih menurut WHO yaitu:

1. Tidak memiliki rasa

Ciri ini adalah indikator utama kebersihan sebuah air. Jika air memiliki rasa maka kemungkinan besar air tersebut tidak bersih. Rasa yang timbul pada air dihasilkan dari zat-zat yang tidak seharusnya ada seperti bakteri.

2. Tidak memiliki bau

Sama seperti rasa, bau yang ada pada air disebabkan oleh bakteri dan pembusukan zat organik. Hal ini menunjukkan sanitasi air yang rendah. Jika mendapatkan air yang berbau sebaiknya lakukan lah perlakuan khusus sebelum menggunakan air tersebut.

3. Jernih

Air bersih memiliki tingkat kejernihan yang stabil. Coba tuang air pada sebuah wadah dan diamkan, jika air tersebut tetap jernih maka air tersebut merupakan air bersih namun jika muncul endapan atau warna menempel pada wadah maka air tersebut tidak bersih. Selain ciri-ciri yang bisa kamu identifikasi sendiri, terdapat beberapa syarat air dinyatakan bersih dan dapat dikonsumsi secara kimiawi.

4. Memiliki pH netral

pH menunjukkan kadar asam/basa pada sebuah substansi. Skala asam/basa adalah dari 1 hingga 14. Tingkat pH agar air aman digunakan adalah 6,5 hingga 8,5. Cara mengetahui pH air ini harus menggunakan sebuah alat.

5. Tidak mengandung zat kimia berlebih

Zat kimia pada air tetap dibutuhkan untuk tubuh namun jika air memiliki kadar zat kimia berlebih maka akan merusak kesehatan. Zat tembaga pada air dibutuhkan untuk tubuh namun jika air mengandung zat ini terlalu banyak maka akan membuat kerusakan pada hati.

6. Tidak mengandung bakteri

Bakteri yang harus dihindari adalah bakteri *E. coli*. Bakteri ini bisa hidup di dalam usus makhluk hidup. Akibat yang ditimbulkan saat meminum air dengan kandungan bakteri ini adalah diare ringan. Mengolah air sebelum dimasak adalah cara terbaik menghilangkan bakteri.²

Fungsi air minum untuk tubuh manusia adalah mempertahankan metabolisme agar seimbang dan fisiologi tubuh. Disamping itu, air berguna sebagai pelarut dalam proses pengolahan makanan sehingga dapat dicerna oleh tubuh. Jika ada kekurangan

¹ <https://www.mustikaland.co.id/news/air-bersih-pengertian-manfaat-ciri/> diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

² *ibid*

air, sel-sel tubuh akan menyusut dan tidak dapat bekerja dengan baik dan air juga merupakan ekskresi cairan (keringat, air mata, urin, uap pernapasan dan cairan tubuh lainnya). Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Umumnya, berat badan manusia dengan lemak dan tulang, 77% berada dalam daging, paru-paru dan ginjal ada 80%, dan di plasma 90 - 95,5%. Artinya semua makhluk hidup tubuhnya terdiri dari air³. Secara umum, kadar pH yang ditentukan untuk air minum yaitu berkisar antara 6 hingga 7, namun pada beberapa air minum yang memiliki kadar pH yang lebih tinggi yaitu 8-9 biasanya dikenal dengan istilah air minum alkali dengan sifat korosi yang rendah. Semakin rendah suatu pH air minum, maka sifat korosi air tersebut akan semakin tinggi. Namun nilai pH air di atas pH netral (7) dapat membentuk kerak lebih besar sehingga kurang efektif dalam membunuh bakteri. Sehingga air yang lebih efektif dalam membunuh bakteri pada kondisi pH netral atau yang bersifat asam lemah. Namun kembali lagi bahwasannya konsumsi air minum harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tubuh yang juga memperhatikan kualitas dari air tersebut. Sehingga solusi dari pemilihan air yang layak dikonsumsi secara umum yaitu air tersebut harus memiliki ciri-ciri umum tidak berasa, berbau, dan berwarna. Sedangkan untuk kualitas air yang baik hal ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh setiap orangnya, yang dimana pH air yang dikonsumsi harus berkisar antara 6,5-8,5 dan tidak boleh lebih dari itu⁴.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat vital. Air bersih digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari mulai dari minum, mandi, memasak, mencuci, serta keperluan lainnya. Persyaratan kualitas air murni memenuhi persyaratan fisik, kimiadan bakteriologis. Persyaratan fisik air murni yang harus dipenuhi adalah kekeruhan, bau dan rasa, warnadan suhu. Untuk mendapatkan air sehat, perlu dilakukan proses pengolahan agar mendapatkan air minum yang layak untuk dikonsumsi.⁵ Melihat fenomena akan kebutuhan terhadap air minum yang sangat tinggi, kini dapat kita jumpai banyak gerai-gerai penyedia air minum isi ulang, keberadaan usaha ini tidak dapat kita larang jika usaha mereka memiliki ijin dan standarisasi penyediaan air minum yang memadai dan sesuai dengan standar Kesehatan. Sejauh ini peraturan yang mengatur mengenai depot air minum isi ulang dapat kita lihat pada Peraturan Melihat fenomena akan kebutuhan terhadap air minum yang sangat tinggi, kini dapat kita jumpai banyak gerai-gerai penyedia air minum isi ulang, keberadaan usaha ini tidak dapat kita larang jika usaha mereka memiliki ijin dan standarisasi penyediaan air minum yang memadai dan sesuai dengan standar Kesehatan. Sejauh ini peraturan yang mengatur mengenai depot air minum isi ulang dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Di dalam Permenkes tersebut dapat dilihat mengenai apa saja kriteria dan juga aspek-aspek

³ Rully Masriatini, Muhrinsyah Fatimura, Andika Pratama. "Analisa kualitas air minum isi ulang dan kemasan di Kelurahan Kenten Laut Kabupaten Banyuasin". Jurnal Online Universitas PGRI Palembang, Volume 6, Nomor1, Juni - Desember 2021

⁴ Sri Handayani, Sudarti, Yushardi. Analisis kualitas air minum berdasarkan kadar PH air mineral dan rebusan sebagai sumber energi terbarukan" OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Vol. 7(2), Desember 2023

⁵ Moh. Dimas Alamsyah, Rezaniasyfiradayati, "Pengetahuan Kualitas Air dengan Pengelolaan Air Minum di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kab. Madiun" Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 Halaman 405-410

yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan akan kebutuhan air minum isi ulang. Dengan adanya Permenkes RI No. 43 Tahun 2014 maka keberadaan dan izin serta tata kelola air minum isi ulang yang dilakukan atau dijual di depo secara tidak langsung harus memenuhi standar Kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 Permenkes RI No. 43 Tahun 2014. Penyedia air minum wajib melakukan pendaftaran dan siap melakukan evaluasi dan pemutahiran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan atas rekomendasi dari dinas Kesehatan melalui lab Kesehatan masyarakat. Tujuan pengawasan dilakukan adalah untuk menjaga kualitas air yang disediakan dan dijual tetap terjaga ke higienisannya sesuai dengan peraturan. Standar mutu air minum disesuaikan dengan standar Internasional oleh WHO. Standar air minum secara mikrobiologi menurut WHO semua sampel tidak boleh mengandung *E. coli* dan bebas dari bakteri Coliform. Standar mutu air minum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Menurut Permenkes No 492 Tahun 2010, syarat kualitas mikrobiologi air minum yaitu kadar maksimum *E. coli* dan Total Coliform dalam air minum yang diperbolehkan adalah 0 per 100 ml sampel⁶.

Berbicara mengenai Peran Pemerintah Daerah, tentunya akan banyak membahas tentang aturan hukum serta tata cara pengajuan izin dan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Melalui Dinas Kesehatan dan Lab Kesehatan Masyarakat. Definisi Lab Kesehatan Masyarakat Menurut Kep.MenkesNo.943/Menkes/SK/VIII/2002 yang dimaksud dengan Laboratorium Kesehatan adalah sarana Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia, penentuan jenis penyakit, kondisi Kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada Kesehatan perorangan dan masyarakat. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum menurut Permenkes RI No. 429 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes RI No. 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin maupun berkala agar air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat terjamin kualitasnya. Pengawasan internal dilakukan oleh pekerja dan pemilik depot air minum isi ulang, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Belum semua pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷ Peran Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen terbatas pada aturan atau tidak adanya perda yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut secara khusus. Namun dalam hal ini pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada dinas perijinan hanya terbatas pada pengajuan izin saja dan tidak dapat melakukan Tindakan secara langsung, dimana seharusnya pemerintah dapat hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 Butir 6 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 yaitu meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Peran pengawas adalah turut

⁶ Delyra Afiqah Zarifah, Diah Navianti, Yulianto Yulianto. "Hygiene Sanitasi dan Uji Kualitas Mikrobiologis pada Depot Air Minum Isi Ulang Kota Palembang" *Jurnal Sanitasi Lingkungan, Poltekes Kemenkes Palembang*, Vol.2, No.2, November 2022

⁷ Atta Isfadhilah, "Pengawasan depot air minum isi ulang dalam menjamin kualitas air minum" *Jurnal Kesehatan Tambusai, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023.

meregister (mencatat) Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum di wilayah kerjanya dengan menggunakan format Register Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Petugas Pengawas harus mencatat semua kasus luar biasa keracunan secara tertib dan teratur, petugas pengawas menyampaikan laporan berkala berupa: Kejadian luar biasa (KLB) keracunan dan tindakan yang dilakukan, kegiatan lain yang perlu dilaporkan. Pengiriman laporan dilakukan berjenjang dengan tembusan dikirim kepada Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi (Direktorat PAS), Ditjen PPM & PL Departemen Kesehatan⁸. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Kemudian penjelasan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang.

Terdapat pula penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penulisan ini, yakni oleh M. Rendi⁹ Aridhayandi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum” tahun 2024. Dalam kajian tersebut, dibahas mengenai pengelolaan air minum oleh pemerintah daerah serta tarif air minum yang dikenakan kepada masyarakat. Sedangkan, penulis memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam mengawasi gerai atau penjual air minum isi ulang di kabupaten atau daerah masing-masing. Kemudian penelitian kedua oleh Rahdiansyah¹⁰, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang” tahun 2018. Dalam tulisan tersebut, yang dititik beratkan dalam pembahasan adalah peranan pemerintah dalam hal ini dinas terkait dalam proses perijinan dan hasil uji akhir kelayakan air minum serta perlindungan terhadap konsumen pembeli air minum isi ulang. Sedangkan pada penelitian yang penulis kaji menitikberatkan pada pengawasan dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam membentuk aturan terkait keberadaan air minum isi ulang yang belum diatur dalam Perda. Serta sanksi bagi pelanggaran terhadap hasil test kelayakan air minum isi ulang tersebut.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan mengambil judul “**Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah**

⁸ Mohammad Rusli Syuaib, “Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pos”, Jurnal Kolaboratif Sains, Universitas Sintuwu Maroso, Volume 7 No. 5, Mei 2024, 1909 -1915

⁹ M. Rendi Aridhayandi. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12844>

¹⁰ Rahdiansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Air Minum isi Ulang”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian hukum ini diantaranya meliputi:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Air Minum?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kepada Konsumen air minum isi ulang Serta Sanksi Bagi Pengusaha Air Minum Isi Ulang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini, memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai yaitu untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan air minum dan bagaimana perlindungan hukum Pemerintah Daerah kepada konsumen air minum isi ulang.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.¹¹ Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan “*research*”, pada hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*true, truth knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah. Seperti yang dinyatakan dalam buku *Legal Research*.¹² Penelitian hukum dapat dibagi menjadi penelitian yuridis normatif serta penelitian yuridis empiris (sosiologis).¹³ Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, di mana permasalahan akan dikaji secara yuridis empiris maksudnya mencari ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau kesenjangan teori dengan dunia realita. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang - Undang atau kontrak) secara *in action/ in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (*in concreto*)¹⁴. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang, sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Data hukum yang digunakan adalah Data primer dan Data sekunder. Lokasi penelitian lapangan ditentukan untuk memperoleh data penunjang dengan teknik *porpusive sampling* Alasan peneliti menentukan wilayah penelitian tersebut adalah

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.42

¹² Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 2000, Legal Research, In A Nutsell, West Group, ST. Paul, Minn, Printed in The United States of America, h.1.

¹³ Ronny Hanitjio, Soemaitro, 1995, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan III, Ghia Indonesia, Jakarta, h.141.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

untuk membangun penguatan argumentasi dari data yang diperoleh dari narasumber. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Air Minum Isi Ulang

Salah satu hak dasar manusia yang bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi adalah mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Kehadiran Negara adalah bertugas untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara yang terdapat pada Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang didalamnya terkandung makna mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. Dalam UUD RI 1945 juga ditegaskan kembali bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD RI 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial. Menurut Iyas Yusuf fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat.¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur adanya pembagian urusan pemerintahan di daerah. Pembagian urusan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan¹⁶.

Berdasarkan Hasil Penelitian atau penelusuran dilapangan yakni di Kabupaten Buleleng bahwa untuk mengawasi keberadaan depo atau usaha Air Minum Isi ulang sangat sulit, dikarenakan banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan usaha mereka pada dinas terkait, sehingga sulit dilakukan pelacakan dan pengawasan secara rutin, selain itu dengan luas wilayah yang cukup luas serta Masyarakat yang cukup padat maka untuk keberadaan usaha air minum isi ulang tidak bisa didata dan tercatat

¹⁵ Susanti, M. (2022). Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

dalam pengawasan di dinas terkait. Selama ini juga belum ada laporan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh usaha air minum isi ulang tersebut, lebih lanjut ditekankan bahwa untuk pengawasan tidak ada regulasi khusus yang mengatur mengenai itu, hanya saja pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perijinan. Bilamana ditemukan adanya keluhan atau aduan yang disampaikan oleh Masyarakat maka, pemerintah daerah melalui dinas perijinan akan melakukan Tindakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha tersebut.¹⁷ Terkait hal-hal teknis lainnya, untuk kabupaten Buleleng sendiri karena telah memiliki Lab Kesehatan Masyarakat yang dapat membantu tugas dari dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan kadar serta kualitas air, maka pemerintah kabupaten Buleleng memberikan hak sepenuhnya kepada dinas Kesehatan untuk menunjuk Lab Kesehatan Masyarakat untuk melakukan uji sampel terhadap kualitas air minum isi ulang jika ada pengusaha yang ingin mengajukan uji sampel. Untuk uji sampel hanya dilakukan satu kali saat adanya permintaan untuk melakukan uji sampel oleh dinas Kesehatan, jika pengusaha air minum isi ulang dikemudian hari ingin melakukan uji sampel kembali maka diwajibkan untuk mengajukan kembali kepada dinas Kesehatan. Kemudian untuk Tindakan pengawasan serta penindakan tidak dilakukan secara rutin atau terjadwal, hanya jika ada keluhan atau aduan dari Masyarakat yang dirugikan.

Kemudian untuk Kota Denpasar, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Bali, pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dilakukan oleh dinas perijinan yang bersinergi dengan satuan polisi pamong praja. Untuk kota Denpasar sendiri sama dengan kabupaten Buleleng telah memiliki lab Kesehatan Masyarakat yang membantu tugas dari dinas Kesehatan, jadi secara umum garis koordinasi hampir sama dengan kabupaten Buleleng, yaitu dinas Kesehatan memberikan tugas kepada lab Kesehatan Masyarakat untuk melakukan uji sampel terhadap kadar dan kualitas air yang diajukan oleh pengusaha air minum isi ulang. Selain itu pemerintah kota Denpasar juga memastikan peredaran air minum isi ulang tersebut telah sesuai dengan standar Kesehatan dengan cara meneliti saat pengajuan perijinan, yakni dari mana sumber air didapat dan bagaimana cara pengolahan sehingga siap untuk dijual kepada Masyarakat secara umum.¹⁸ Selama ini belum ditemukan adanya kasus atau aduan dari Masyarakat yang mengalami kerugian atau hal lainnya dari air minum isi ulang yang beredar di Masyarakat, hal ini juga dikarenakan air minum tidak dapat memberikan efek secara langsung terhadap Kesehatan terkecuali ada racun atau zat berbahaya lainnya yang dapat terjadi atau bereaksi pada saat air tersebut diminum. Kemungkinan hal-hal kecil yang terjadi di Masyarakat langsung diadukan atau dilakukan komplain oleh Masyarakat itu sendiri terhadap pengusaha air minum isi ulang, itupun dengan kasus yang tergolong ringan.

Kemudian dilihat dari daerah lainnya yang menjadi sasaran penelitian yakni Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan, yang mana kedua Kabupaten ini tidak memiliki Lab Kesehatan Masyarakat yang dapat membantu dinas Kesehatan untuk melakukan uji sampel air minum, namun secara umum tugas untuk melakukan uji sampel dilakukan oleh dinas Kesehatan kabupaten terkait yang dikerjakan oleh Bagian Kesehatan Lingkungan. Banyaknya usaha yang tidak mendaftarkan secara langsung ijin usaha yang dimiliki dan menurut Pemkab Tabanan bahwa jika ada

¹⁷ Berdasarkan Wawancara dengan Made Bayu Waringin, selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng.

¹⁸ Berdasarkan Wawancara dengan Komang Lestari Kusuma Dewi, selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar.

pengusaha yang berniat membuka dan mengajukan ijin maka segala proses dilakukan oleh Dinas Perijinan dengan berkordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan¹⁹. Kemudian untuk Kabupaten Klungkung usaha air minum isi ulang hanya ada dua, dan keberadaannya pun kurang mendapat perhatian dari Masyarakat, ini dipengaruhi juga oleh daya beli Masyarakat yang kurang tertarik terhadap air minum isi ulang. Namun berdasar hasil penelurusan terkait dengan usaha air minum isi ulang, Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung juga belum memiliki data yang valid mengenai perijinan, karena tidak ada data yang tersedia di pemerintah daerah. Sedangkan mengenai proses pengajuan perijinan pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada dinas perijinan jika ada yang ingin mengajukan perijinan, namun besar harapan agar semua bentuk usaha yang ada agar terdata dan memiliki perijinan yang jelas. Untuk pengajuan uji sampel dikarenakan Kabupaten Klungkung yang juga tidak memiliki lab Kesehatan Masyarakat memberikan tugas kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan melalui Bagian Kesehatan Lingkungan, sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dan selama adanya usaha air minum isi ulang di Kabupaten Klungkung belum ditemukan adanya laporan yang menyebabkan kerugian yang ditimbulkan oleh usaha air minum isi ulang tersebut.²⁰

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Serta Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Memenuhi Standar Minimal Air Minum Isi Ulang

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi.²¹ Melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.²² Negara hukum juga menjunjung supremasi hukum (*rule of law*) yang harus ditegakkan secara konsekuen agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum

¹⁹ Berdasarkan Wawancara dengan I Gede Nyoman Mardiana, selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan

²⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Eke Andriyan Prawira, selaku Analis Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung

²¹ Bachtar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 1

²² Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Alumni, Bandung, h. 18

yang dibuatnya sendiri.²³ Kedudukan negara menjalankan pemerintahan sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan peundang-undangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan berkewajiban memberikan pelayanan publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan terutama negara penganut *welfare state*, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa:²⁴

“Negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidak-tidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu. Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan, perumahan, pendapatan, pelayanan kesehatan: ia berhak terhadap ‘persamaan’ dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati.”

Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.²⁵ Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Sedangkan Tatiek Sri Djatmiati mengatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat, hak-hak untuk menerima dari pemerintah seperti jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya maka dari itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.²⁶ Dalam teori negara kesejahteraan fungsi dari pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi utama negeri atau pemerintah. Amrah Muslim mengatakan bahwa tugas suatu negara menurut paham modern dalam negara kesejahteraan (*social service state*) adalah mengadakan kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan sejahtera yang sebesar-besarnya berdasar pada keadilan dalam suatu negara hukum.²⁷ Didalam hal ini kekuasaan negara demokrasi yang diberikan oleh rakyat bukan seolah-olah hanya diperoleh begitu saja. Rakyat menyerahkan kekuasaannya dan hak mereka kepada negara yang dimaksudkan agar negara mampu melindungi hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan.²⁸ Keberadaan negara mempunyai fungsi

²³ Jhon Rawls, 2006, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filasafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 29

²⁴ Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Jakarta, h. 103.

²⁵ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87-100.

²⁶ Gaite, Y. (2022). Kewenangan Kepala Kecamatan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Kinerja Kerja Kepala Desa Studi Pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur. Bacarita Law Journal, 3(1), 16-34.

²⁷ Afifah, L. N. (2022). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Jurist-Diction, 5(2).

²⁸ Miriam Budiardjo.1986. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta, h, 56

dalam menjaga rakyatnya, fungsi yang dimiliki oleh negara dapat dibagi menjadi dua yaitu: yang pertama ialah fungsi keamanan, bahwa dalam fungsi keamanan ini negara berperan aktif untuk menghindarkan rakyatnya dari kondisi yang disebut “*belum omnium contra omnes*” atau perang antara semua melawan semua.²⁹ Yang kedua mengenai fungsi kesejahteraan dimana negara berperan penting untuk meratakan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat, dan juga untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial yang ada.³⁰ Dengan adanya fungsi tersebut, tidak hanya melindungi yang kuat tetapi negara juga melindungi yang lemah. Sehingga negara dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyatnya termasuk memberikan akses atau pemberian bantuan hukum terhadap semua masyarakatnya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu juga. Keberadaan tanggungjawab yang dimiliki oleh negara sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi sebuah negara.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai tindakan yang dibebankan yang wajib dilaksanakan dan terpenuhi sebagai bentuk dari dampak yang timbul yang diakibatkan oleh perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai dampak dari perbuatan pihak lain, atau menjadi dedikasi, atau pengorbanan pihak yang mempunyai tanggung jawab. Bahwa tanggungjawab yang dimiliki oleh negara, dapat diklasifikasikan dan difokuskan menjadi empat bagian yaitu : yang pertama tanggung jawab negara mengenai kewarganegaraan, kedua tanggung jawab negara mengenai keadilan sosial, yang ketiga tanggung jawab negara mengenai perekonomian, yang keempat tanggung jawab negara mengenai lingkungan.³¹ Mengenai tanggungjawab negara juga sudah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa, terselip konsep mengenai tanggung jawab negara dalam konteks HAM atau *state responsibilities*, yang terdapat pada Pasal 28I ayat (4) sampai dengan (5), yang menyatakan bahwa “ Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Yang dimana pada pasal tersebut dapat menjadi dasar ataupun kunci untuk mengetahui mengenai tanggung jawab konstitusional yang memang seharusnya dilaksanakan oleh negara atau dapat diartikan pemerintah.³² Diketahui bahwa dalam prinsip dan ketentuan mengenai suatu konsep hak asasi manusia dimana negara menjadi pelaksana kewajiban dan penanggungjawabnya terdapat point penting yang menjadi penegasan yaitu, pertama bahwa negara berlaku sebagai penanggungjawab atau *duty holder* dalam pemenuhan pelaksanaan hak asasi dan warga negara yang telah menjadi kewajiban sebagai penerima kewajiban. Yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia negara sendiri tidak mempunyai hak karena negara hanya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang dijamin oleh instrumen internasional dalam hal untuk memnuhi kesejahteraan dan hak yang dimiliki warga

²⁹ Keliat Makmur, Agus Catur Aryanto, Cut Nury Hikmah, Hana Hanifah, Rizki Yuniartini. 2014. *Tanggung Jawab Negara*. Friedrich-Ebert- Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Jakarta, h.16

³⁰ Ibid, h 17

³¹ Ibid, h. 18

³² Rudy Hendra, Eka N. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Sosial Security)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.2, Juli 2012.

negara. Yang ketiga, apabila negara tidak mampu atau tidak ingin melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya maka dapat dikatakan negara melanggar hak asasi manusia, dan apabila pelanggaran tersebut tidak dipertanggung jawabkan maka masyarakat internasional dapat mengambil tanggung jawab tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mengenai tanggung jawab dan kewajiban negara terdapat tiga pokok yaitu menghormati, melindungi serta memenuhi.³³

Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab apabila negara tidak melaksanakannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terdapat dua pelanggaran yang dapat dilakukan oleh negara yaitu, yang pertama pelanggaran yang dikarenakan suatu tindakan atau *by commision* disebabkan apabila negara ikut campur secara langsung untuk mengatur hak hak yang dimiliki warga negara yang seharusnya itu dihormati. Yang kedua, suatu pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya pembiayaan atau *by omission* disebabkan karena negara tidak mampu untuk melaksanakan atau bisa dikatakan gagal dalam mengambil keputusan atau tindakan lebih lanjut yang sangat diperlukan guna melaksanakan kewajiban hukum yang sudah menjadi tanggungjawab negara.³⁴ Pada dasarnya bahwa suatu negara yang bertanggung jawab yaitu negara yang mengutamakan hak yang dimiliki rakyatnya yang dijadikan sebagai suatu kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang, melindungi dari segala ancaman bahaya baik dalam maupun luar, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki masyarakat negara diharuskan untuk terbuka secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan UUD 1945, disamping tuntutan HAM atau memenuhi *the rights to receive* warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memeberikan pelayanan umum (*bestuurszorg*) berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeienis*).

Dalam menentukan pelayanan terhadap masyarakatnya pemerintah tentunya tidak dengan mudah menentukan dan pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat. Pemberian diskresi tersebut sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara.³⁵ Pemberian diskresi adalah tindakan hukum pemerintahan yang selanjutnya dituangkan dalam instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*) dan dilaksanakan tentunya. Selain itu pemerintah juga dapat menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat

³³ Maidah Purwanti. "Kewajiban dan Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia" Jurnal Artikel Cerdas Hukum, September 2016.

³⁴ Julista Mustamu. "Pertanggung jawaban Hukum Pemerintah". Jurnal Sasi Vol.20 No. 2, Juli-Desember 2014.

³⁵ Ibid, h. 104-105

hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu. Penjelasan mengenai penggunaan kewenangan yang mengandung pertanggung jawaban dan tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggungjawab hukum karena tergantung caranya adalah memperoleh dan menjalankan kewenangan tersebut. Cara memperoleh kewenangan akan mempengaruhi badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh, apabila diperoleh secara atribusi dan delegasi maka badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang memikul pertanggung jawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandate bukanlah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate (mandans).

Pemerintah Daerah menjadi institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada Daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur segala jenis ijin usaha yang ada di daerahnya berikut dengan sanksi bagi setiap pelanggarannya, Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada dasarnya pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan perda tentang Air Minum Isi Ulang atau Air Minum Yang dikategorikan layak untuk dikonsumsi merupakan suatu hal yang mendesak untuk diwujudkan sebagai bentuk komitmen dan *political will* setiap Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat di daerahnya. Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Melalui perda tersebut Pemerintah Daerah hendak menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban Pemerintah Daerah dan hak warganya, serta sanksi hukum apa yang dapat dikenakan bagi setiap pelanggaran yang ditimbulkan oleh pengusaha air minum isi ulang. Sebab selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh dinas perijinan namun tidak ada payung hukum yang jelas mengenai bentuk ijin dan serta sanksi bagi pelanggar. Hanya saja ditekankan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan berpotensi untuk dilakukannya pemanggilan dan sampai penutupan usaha serta ganti kerugian jika menimbulkan kerugian secara sepihak.

Pengawasan terhadap air minum bagi masyarakat merupakan tugas dari Dinas Kesehatan, dibantu oleh Lab Kesehatan Masyarakat bagi daerah yang telah memiliki. Tujuan dari diberlakukannya pengawasan ini adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengawasi kualitas air yang dikonsumsi masyarakat agar tetap memenuhi syarat kesehatan. Untuk itu penyedia air minum wajib melakukan pengecekan atau uji klinis secara berkala minimal 1 bulan sekali dan diajukan ke Dinas Kesehatan Untuk selanjutnya diteruskan ke Lab.

Kesehatan Masyarakat atau bagian Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan. Mengenai sanksi jika ada pelanggaran terhadap usaha air minum isi ulang umumnya jika ditemukan adanya pelanggaran maka Dinas Kesehatan dibantu oleh dinas perijinan dan Sat Pol-PP akan melakukan pemanggilan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran sebelum diserahkan kepada pihak Kepolisian jika diperlukan. Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kelalaian dari pengusaha tersebut, mulai dari dicabutnya ijin usaha dan penggantian kerugian jika menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dari unsur Pidana dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa serta kajian diatas, sementara dapat disimpulkan bahwa Diperlukan aturan yang dapat mengatur secara khusus mengenai usaha air minum isi ulang, sebab selama ini pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung Masyarakat tidak dapat menerapkan aturan yang secara khusus dapat dikenakan kepada pengusaha air minum isi ulang. Mengenai bentuk perlindungan hukum dan sanksi yang dapat diberikan sampai saat ini dapat dikatakan sudah membantu untuk memberikan rasa nyaman kepada konsumen, dibuktikan dengan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara berkordinasi dengan dinas-dinas terkait jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap usaha air minum isi ulang tersebut. Setiap Jenis Usaha yang dapat berpotensi merugikan Masyarakat atau konsumen hendaknya agar dibuatkan aturan hukum sejenis Perda untuk melindungi pemerintah dalam mengambil setiap Tindakan yang dilakukan guna kepentingan masyarakatnya. Selama ini payung hukum yang digunakan hanyalah sebatas pengawasan oleh dinas terkait, namun tidak ada Perda yang secara tegas mengatur mengenai itu. Terkait dengan Bentuk perlindungan Hukum dan Sanksi yang diberikan hendaknya pemerintah memperhatikan betul-betul mengenai Bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada konsumen, karena konsumen disini merupakan Masyarakat yang wajib dilindungi dan diperhatikan dengan baik. Berkaitan dengan sanksi, pemerintah dapat dengan tegas menjatuhkan sanksi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan usaha tersebut berpotensi merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- A. Abdurrahman, 1986, Kamus Ekonomi - perdagangan, Gramedia
- Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 1
- Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Alumni, Bandung, h. 18

- Jhon Rawls, 2006, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filasafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 29
- Keliat Makmur, Agus Catur Aryanto, Cut Nury Hikmah, Hana Hanifah, Rizki Yuniartini. 2014. Tanggung Jawab Negara. Friedrich-Ebert- Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Jakarta, h.16
- M.Shidqon Prabowo,2010, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta.
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 2000, Legal Research, In A Nutsell, West Group, ST. Paul, Minn,Printed in The United States of America, h.1.
- Ronny Hanitjio, Soemaitro, 1995, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan III, Ghia Indonesia, Jakarta, h.141.
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian,2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka: Jakarta
- Susanti, M. 2022. Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Zainal Asikin dkk,2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group.

Karya Ilmiah Jurnal

- Atta Isfadhilah, 'Pengawasan depot air minum isi ulang dalam menjamin kualitas air minum" Jurnal Kesehatan Tambusai, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023.
- Afifah, L. N." Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan". Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga 5(2). (2022)
- Delyra Afiqah Zarifah, Diah Navianti, Yulianto Yulianto. " Hygiene Sanitasi dan Uji Kualitas Mikrobiologis pada Depot Air Minum Isi Ulang Kota Palembang" Jurnal Sanitasi Lingkungan, Poltekes Kemenkes Palembang, Vol.2, No.2, November 2022
- Gaite, Y. Kewenangan Kepala Kecamatan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Kinerja Kerja Kepala Desa Studi Pada Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur. Bacarita Law Journal, 3(1), 16-34. (2022).
- Julista Mustamu. "Pertanggung jawaban Hukum Pemerintah". Jurnal Sasi Vol.20 No. 2, Juli-Desember 2014.
- Moh. Dimas Alamsyah, Rezania Asyfiradayati, " Pengetahuan Kualitas Air dengan Pengelolaan Air Minum di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kab. Madiun" Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 Halaman 405-410.
- Mohammad Rusli Syuaib, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pos", Jurnal Kolaboratif Sains, Universitas Sintuwu Maroso, Volume 7 No. 5, Mei 2024, 1909 -1915
- Maidah Purwanti. "Kewajiban dan Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia" Jurnal Artikel Cerdas Hukum, September 2016.
- Muhlashin, I. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87-100. (2021).

- M. Rendi Aridhayandi. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12844>
- Rahdiansyah. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018
- Rudy Hendra, Eka N. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.2, Juli 2012.
- Rully Masriatini, Muhrinsyah Fatimura, Andika Pratama. "Analisa kualitas air minum isi ulang dan kemasan di Kelurahan Kenten Laut Kabupaten Banyuasin". Jurnal Online Universitas PGRI Palembang, Volume 6, Nomor1, Juni - Desember 2021
- Supriyanto (2009). "Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian". Jurnal Ekonomi & Pendidikan. 6 (2): 194. ISSN 1829-8028
- Sri Handayani, Sudarti, Yushardi. Analisis kualitas air minum berdasarkan kadar PH air mineral dan rebusan sebagai sumber energi terbarukan" OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Vol. 7(2), Desember 2023

Sumber Internet

- <https://www.mustikaland.co.id/news/air-bersih-pengertian-manfaat-ciri/> diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
- <https://infolaboratoriumkesehatan.wordpress.com>. Diakses Tanggal 21 Desember 2021
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021.
- <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank-data/layanan-laboratorium-kesehatan-masyarakat-kabupaten-buleleng-65>. Diakses Tanggal 21 Desember

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 907/MENKES/SK/2002 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota